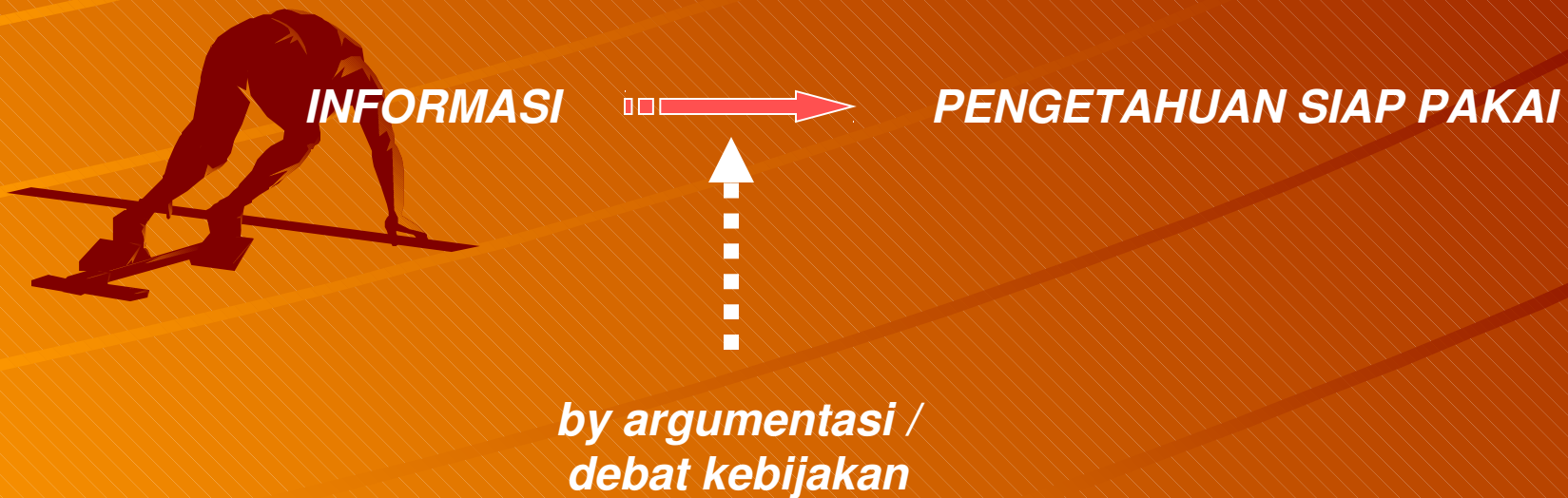


ARGUMENTASI KEBIJAKAN

- * Argumentasi dan debat kebijakan merupakan sarana utama untuk menghimpun pengetahuan yang siap pakai.
- * Argumentasi dan debat kebijakan berperan dalam mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan **MENJADI** pengetahuan yang siap pakai (*usable*)



FAKTOR PENTING DALAM ARGUMEN KEBIJAKAN

1. DATA

2. INFORMASI :

Adalah data yang telah diolah / ditafsirkan dan diorganisasi untuk tujuan tertentu yang dapat mengubah pikiran atau tindakan para pembuat kebijakan

3. PENGETAHUAN :

Adalah informasi yang telah dikomunikasikan kepada beberapa pembuat kebijakan yang mentransformasikannya menjadi keyakinan (*yang bisa benar*) sehingga memungkinkan pencapaian tujuan dibawah situasi tertentu.

4. KEBIJAKAN

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses berargumentasi dan berdebat untuk menciptakan, mengkaji secara kritis dan mengkomunikasikan keyakinan yang plausibel benar tentang kinerja dari proses pembuatan kebijakan.



JENIS - JENIS PERNYATAAN PENGETAHUAN

* Pernyataan pengetahuan adalah kesimpulan tentang argumen kebijakan.

* Meliputi 3 jenis, yaitu pernyataan bersifat :

a. *Desainatif (Designative)*

Mempersoalkan “ *fakta* “ yaitu :
Apa hasil - hasil dari suatu kebijakan ?

a. *Evaluatif*

Mempersoalkan “ *nilai* “ yaitu :
Apakah kebijakan itu siap pakai ?

a. *Advokatif*

Mempersoalkan “ *tindakan* “ yaitu :
Kebijakan mana yang sebaiknya diambil ?

UNSUR / ELEMEN dalam ARGUMEN KEBIJAKAN

1. Informasi yang relevan dengan kebijakan

(*Policy – relevant information*) → (I)

- Meliputi : informasi tentang masalah – masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi – aksi hasil dan kinerja kebijakan yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk (misal : statistik, sebagai kesimpulan para ahli atau sebagai suatu ekspresi nilai dan kebutuhan.

2. Klaim kebijakan (*policy – claim*) → (C)

- Merupakan pernyataan kesimpulan dari suatu argumen kebijakan.

- Merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan.

Bila klaim kebijakan mengikuti penyajian informasi, klaim tersebut berbunyi “MAKA”, sebagai berikut :

Jika energi nuklir lebih efisien (I), MAKA Pemerintah seharusnya melakukan investasi lebih banyak pada proyek pembangunan pusat pembangkit tenaga nuklir (C).

3. *Pembenaran (Warrant)* → (*W*)

- Merupakan suatu asumsi didalam argumen kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.
- Memberikan suatu alasan untuk menerima klaim.
Misal : pemerintah seharusnya melakukan investasi dst (*C*), karena lebih banyak energi yang dibutuhkan (*W*), mengingat bahwa energi nuklir ternyata lebih efisien.

4. *Dukungan (Backing)* → (*B*)

- Dukungan (*B*) bagi pembenaran (*W*) terdiri dari asumsi – asumsi tambahan atau argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak.

Dukungan dapat diambil dari berbagai bentuk.

antara lain : Hukum – hukum ilmiah, pertimbangan para ahli atau prinsip – prinsip moral dan etika.

5. *Bantahan (Rebuttal)* → (R)

- ▶ Bantahan merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim (C) asli tidak diterima atau diterima namun dalam derajat penerimaan tertentu.

6. *Kesimpulan (Qualifier)* → (Q)

- ▶ Mengekspresikan derajat dimana analisis yakin terhadap suatu klaim kebijakan.



ELEMEN - ELEMEN ARGUMEN KEBIJAKAN



KRITERIA - KRITERIA dalam ARGUMEN KEBIJAKAN

1. *Kelengkapan*

- ✦ Unsur-unsur dari suatu argumen harus mengandung kepaduan yang mencakup semua pertimbangan yang memadai.

2. *Kesesuaian*

- ✦ Konsistensi dan kecocokan secara internal dari unsur-unsur yang ada dalam suatu argumen.

3. *Kepaduan (Cohesiveness)*

- ✦ Keterkaitan secara operasional unsur – unsur suatu argumen.

4. *Keteraturan Fungsional*

- ✦ Unsur – unsur dari suatu argumen harus memenuhi pola yang diharapkan.

5. *Kesederhanaan fungsional, ekonomi dan efikasi*

- ✦ Unsur – unsur dari suatu argumen haruslah dirancang secara sederhana dan hemat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
(gampang dipahami)

BENTUK - BENTUK ARGUMEN KEBIJAKAN

- * Merupakan alat untuk mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan menjadi pernyataan kebijakan, meliputi cara – cara :

1. *Cara Otoritatif*

- * Pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen dari pihak yang berwenang.
- * Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang status yang dicapai atau yang diperoleh pembuat informasi.

2. *Cara Statistik*

- * Pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang diperoleh dari sampel.
- * Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi para anggota sampel juga benar bagi seluruh anggota populasi.

3. Cara Klasifikasional

- * Pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal dari suatu keanggotaan.
- * Informasi diubah menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi suatu kelas individu atau kelompok yang tercakup dalam informasi itu juga benar bagi individu / kelompok yang merupakan (yang diyakini sebagai) anggota di kelas yang bersangkutan.
- * Misal : Argumen yang menyangkut diskriminasi ras dan seks, atau persepsi mengenai musuh ataupun ideologi.

4. Cara Intuitif

- * Pernyataan didasarkan pada argumen yang berasal dari batin (insight).
- * Informasi diubah menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi tentang situasi mental dalam (*inner mental states*) dari pembuat informasi yang dijadikan salah satu argumen untuk menerima suatu rekomendasi.

5. *Cara Analisentrik*

- ✦ Pernyataan didasarkan pada argumen yang berasal dari metode.
- ✦ Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang validitas metode atau aturan yang ditetapkan oleh analis.

6. *Cara Eksplanatori*

- ✦ Pernyataan dibuat atas dasar argumen yang dibuat dari suatu penyebab.
- ✦ Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang adanya kekuatan penyebab tertentu (causes) dan hasilnya (effects).

7. *Cara Pragmatis*

- ✦ Pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel atau analogi.
- ✦ Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang daya pengaruh tujuan, nilai dan dorongan, asumsi tentang kesamaan hubungan diantara dua atau lebih latar (settings) kebijakan.

8. *Cara Kritik Nilai*

- ✦ Pernyataan didasarkan pada argumen yang diangkat dari etika.
- ✦ Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kekeliruan, kebaikan atau keburukan dari kebijakan dan konsekuensinya.



Semua bentuk analisis kebijakan harus dipandang sebagai sesuatu yang secara potensial bersifat "*ideologis*" dalam arti bahwa metode analisis kebijakan mungkin mencerminkan nilai yang riil dari si analis.

Oleh karena itu cara terbaik untuk membuat suatu nilai menjadi eksplisit adalah dengan memasukkannya sebagai bagian dari suatu argumen atau debat etis yang bernalar.

